

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PELAKSANAAN
SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID – 19**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi dalam Prodi Akuntansi Syariah



Oleh:

FIRDAUS AULIA PURNAMA

NIM. 1905046074

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Aulia Purnama

NIM : 1905046074

Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid – 19

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 1 Desember 2022

Pembuat Pernyataan,



Firdaus Aulia Purnama

NIM. 1905046074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Firdaus Aulia Purnama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya mengirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Firdaus Aulia Purnama

NIM : 1905046074

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid-19.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 4 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., AK, CA.

NIP. 197912222015032001



Faris Salahuddin Zakiy, M.E.

NIP. 199002272019031012

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Firdaus Aulia Purnama
NIM : 1905046074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul : **Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude, pada tanggal:

8 Maret 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starta I dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2023/2024

Semarang, 08 Maret 2023

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Fajar Adhitya, S.Pd., MM.
NIP. 198910092015031003

Sekretaris Sidang

Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., AK, CA.
NIP. 197912222015032001

Penguji Utama I

Singgih Muheramtohadhi, M.E.I
NIP. 198210312015031003



Penguji Utama II

Kartika Marella Vanni, M.E.
NIP. 199304212019032028

Pembimbing I

Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., AK, CA
NIP. 197912222015032001

Pembimbing II

Faris Salahuddin Zakiy, M.E.
NIP. 199002272019031012

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“ Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman”

(Q.S Ali-Imran:139)

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Aulia Purnama

NIM : 1905046074

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid – 19

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 4 Desember 2022

Pembuat Deklarasi,



Firdaus Aulia Purnama

NIM. 1905046074

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ا = a

ي = i

و = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah

Tasydid dilambangkan dengan konsonan ganda (عَّ).

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulisdengan *al...* misalnya الصناعات = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya *الطبيبة المعيشة* = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system* dan pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19.

Sampel penelitian ini terdiri dari 100 wajib pajak UMKM dengan pengambilan sampel menggunakan random sampling, yang ada di Kota Semarang pada masa pandemi covid-19.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi covid-19. Sedangkan pelaksanaan *self assessment system* dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi covid-19. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang baik bagi pemerintah Kota Semarang dan Kantor Pelayanan Pajak wilayah Kota Semarang dalam rangka penyusunan kebijakan publik atau peraturan yang terkait dengan bidang perpajakan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax socialization, tax authorities services, implementation of self assessment systems and income on UMKM taxpayer compliance in Semarang City during the Covid – 19 Pandemic.

The sample of this study consisted of 100 taxpayer UMKM with random sampling in the Semarang City during Covid – 19 pandemic.

The results of the regression analysis show that socialization of taxation and tax authorities has no effect on UMKMtaxpayer compliance during Covid – 19 pandemic. Meanwhile, the implementation of the self assessment system and its influence on UMKM taxpayer compliance during the Covid – 19 pandemic. The results of this study can be used as good input for the government of the City of Semarang and the Regional Tax Service Office of the City of Semarang in the context of formulating policies or public regulations related to the field of taxation.

Keywords: *UMKM Taxpayer Compliance, Tax Socialization, Tax Authority Services, Self Assessment System, and Income.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid – 19” untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta (S.1) di Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya kelak di hari akhir. Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak dari mulai periode perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tentu tidak lepas dari pihak-pihak yang berjasa dalam hidup penulis dan dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. Ratno Agriyatno, SE., M.Si. Akt. CA, CPA selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah dan dosen wali saya serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang senantiasa sabar dan selalu support saya dalam menghadapi perkuliahan dari awal hingga akhir kelulusan.
4. Ibu Dessy Noor Farida, SE, M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Faris Salahuddin Zakiy, M.E. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, nenek, kakak, adik dan keluarga besar bani Abdul Chalim, Bapak Maman Supratman, Ibu Nur Farida, Mbah Mujenah, Diah Ayu, Satria, Kesya dan Padhe serta Lilik tercinta. Terimakasih yang tak terhingga atas segala ridho, do'a, kerja keras, bimbingan, nasihat, perhatian, semangat dan dukungannya yang selalu hadir disetiap proses saya, sehingga saya mampu menyelesaikan tanggung jawab ini.

7. Guru spiritual saya sekaligus orang yang sudah dianggap seperti kaka saya sendiri Mas Wawan. Terimakasih banyak atas semua arahan dan bimbingan serta kepedulian terhadap saya sehingga bisa menempuh titik ini.
8. *Patner* yang hingga saat ini menjadi support system tanpa lelah memberikan dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, Marisa Isnaini.
9. Shandy Pratama teman seperjuangan yang sangat loyal dan sangat membantu dalam perjalanan saya didunia perkuliahan
10. Teman-Teman Seperjuangan Kelas AKS C19 yang memberikan pengalaman baru
11. Teman-Teman Organisasi internal maupun eksternal yang membantu bertumbuhnya saya di UIN Walisongo Semarang
12. Teman-Teman Kelompok KKN MMK 41 yang sangat memberikan pengalaman serta cerita singkat di UIN Walisongo Semarang.

Penulisan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Semoga amal dan kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dapat mendapat pahala dari Allah SWT.

Semarang, 4 Desember 2022

Penulis,



Firdaus Aulia Purnama

NIM. 1905046074

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Err
or! Bookmark not defined.	
MOTTO.....	iii
DEKLARASI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Berfikir.....	23
2.4 Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Data Penelitian.....	27
3.3 Populasi dan Sampel.....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Deskripsi Data Objek Penelitian.....	37
4.2 Teknik Analisis Data.....	39
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	44
4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data Penelitian.....	45
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Simpulan.....	52
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	53
5.3 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Perkembangan UMKM Kota Semarang.....	2
Gambar 1. 2	Perkembangan UMKM Kota Semarang.....	3
Gambar 2. 1	Kerangka Berpikir	23
Gambar 4. 1	Hasil <i>Scatter Plot</i>	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Barat	4
Tabel 1. 2 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Candisari.....	4
Tabel 1. 3 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Tengah.....	5
Tabel 1. 4 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Gayamsari.....	5
Tabel 1. 5 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Selatan.....	5
Tabel 1. 6 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Timur.....	5
Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Pilihan Jawaban dalam Kuesioner	29
Tabel 3. 2 Definisi Operasional.....	31
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel	37
Tabel 4. 2 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4. 3 Klasifikasi Berdasarkan Usia	38
Tabel 4. 4 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan.....	38
Tabel 4. 5 Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan	38
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas.....	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	42
Tabel 4. 9 Hasil Uji <i>One Sample Kolmogroff – Semirnov Test</i>	42
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolonieritas	43
Tabel 4. 11 Hasil Uji Glejser.....	44
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	45
Tabel 4. 13 Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i> (Uji F).....	46
Tabel 4. 14 Hasil Uji t.....	47
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>).....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perizinan Dirjen Pajak.....	57
Lampiran 2 Surat Perizinan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.....	58
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian	60
Lampiran 4 Jawaban Responden.....	64
Lampiran 5 Hasil Perhitungan SPSS.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara, yang memiliki nilai nominal tertinggi dari pada sektor pendapatan milik negara lainnya. Negara yang sukses dalam melakukan pemungutan pajak dari warga negara, dapat memberikan kemanfaatan terhadap kemakmuran dan keseimbangan rantai ekonomi negara tersebut.¹ Kedudukan pajak yang menjadi pendapatan pokok dalam negara dan mampu menjadi sarana dalam berupaya memaksimalkan perekonomian, menjalankan upaya pemerintah, dan memberikan fasilitas umum untuk penduduk. Bahwa beberapa tahun belakangan, pajak memberikan 70% besaran yang didapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).² Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dan semakin kompleksnya tantangan zaman modern.

Faktor utama regulasi yang mengatur tentang perpajakan dapat dikatakan berhasil apabila terjadi adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dalam kurun waktu 1 periode yang dilakukan dengan upaya ekstensifikasi yakni berupa peningkatan pajak yang diterima untuk negara dengan metode melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak (WP) yang belum masuk kedalam pendataan WP atau dengan melakukan strategi-strategi baru berupa pajak baru. Kemudian ada juga upaya intensifikasi yang berupa dilakukan peningkatan patuh pajak untuk seluruh warga negara, dilakukan perbaikan dalam melayani warga negara yang akan melakukan pembayaran pajak, dan upaya lainnya.³ warga negara yang akan melakukan pembayaran pajak, dan upaya lainnya. Sedangkan menurut Farouq bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor kesuksesan pemerintah dalam melakukan pengupayaan merealisasikan atau mengalokasikan pajak yang dikumpulkan dari warga negara, sehingga tidak timbul spekulasi pembayaran pajak yang bersifat memaksa atau patuh pajak, akan tetapi seimbang dengan hukum yang berlaku, sesuai prosedur dan berkelas.⁴ Faktor lainnya agar target pajak tercapai juga diperlukan respon positif atas kewajiban dan patuh pajak oleh WP supaya dapat terpenuhi pemungutan pajak yang diterapkan dengan berlandaskan hukum atau regulasi yang ditetapkan.

¹ Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, Edisi 1, Jakarta: Kencana, 2018, h. 113.

² *Ibid*, h. 127.

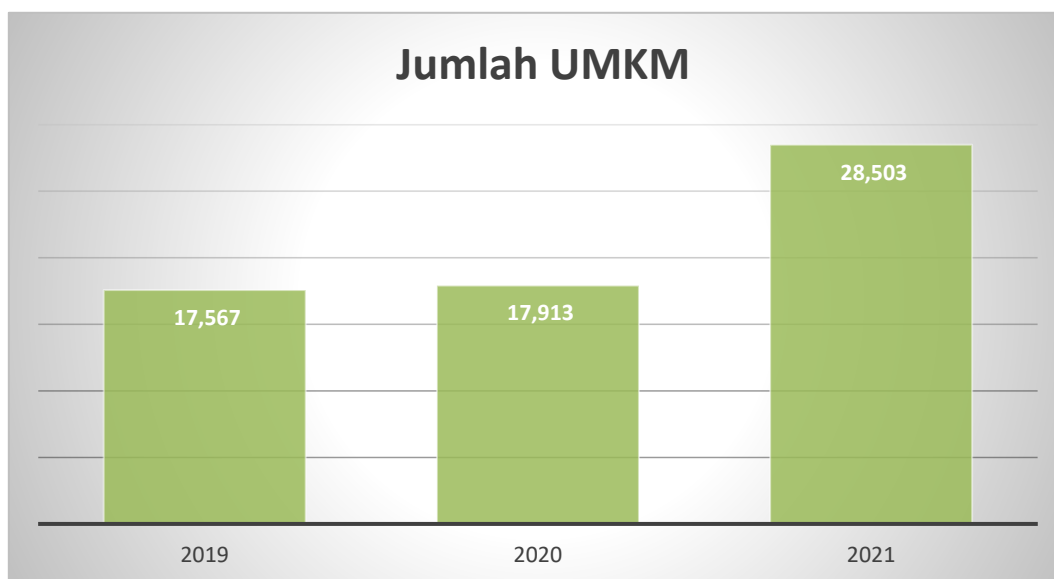
³ Simanjuntak, et. al, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, h. 97.

⁴ *Op.cit.* 2018, h. 3.

Direktorat Jenderal Pajak telah merencanakan strategi-strategi baru, sehingga dapat menunjang upaya dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menyeleksi Wajib Pajak baru. Seluruh usaha yang beroperasi diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Dirjen Pajak supaya memberikan kemudahan didalam melakukan pendataan dan pemantauan untuk setiap unit usaha yang berkewajiban atas pajaknya. Adapun upaya persuasif juga dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan melakukan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi sehingga Wajib Pajak potensial dapat terdaftar secara aktual. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang mendominasi kegiatan perekonomian nasional sekaligus Wajib Pajak potensial yang kontribusinya belum dioptimalkan oleh pemerintah.

Kontribusi UMKM di Kota Semarang sendiri lumayan signifikan. Berdasarkan pencatatan Dinas Koperasi & UMKM Kota Semarang perkembangannya per 31 Desember 2021 mencapai 28.503 orang pelaku UMKM. Dibawah ini adalah data perkembangan UMKM Kota Semarang dari tahun 2019-2021.

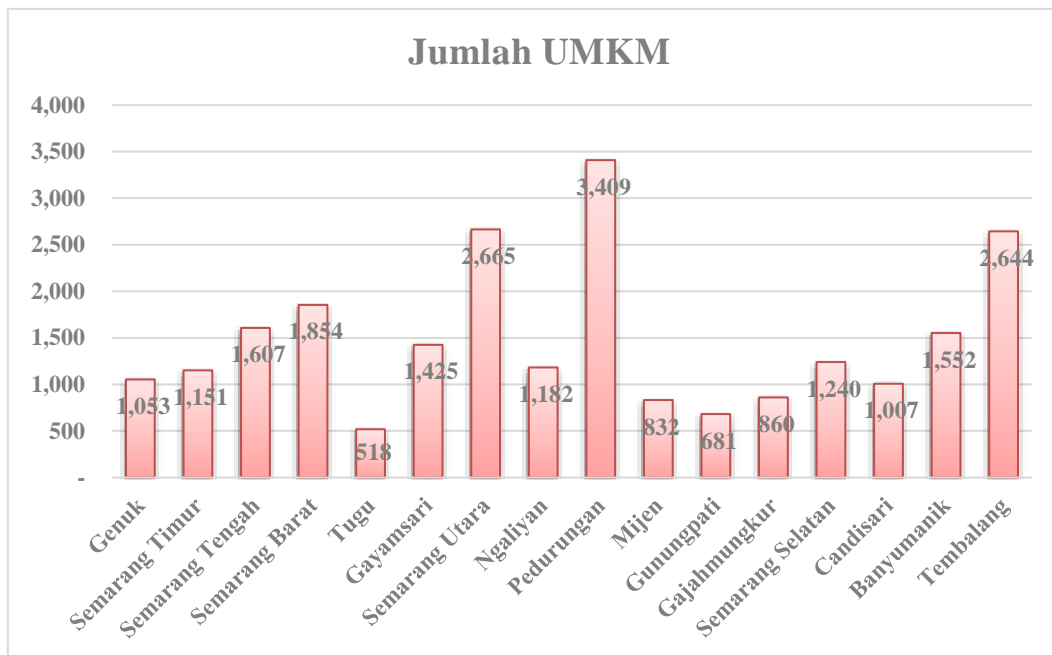
Jumlah UMKM Kota Semarang



Gambar 1. 1 Perkembangan UMKM Kota Semarang

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan <https://data.semarangkota.go.id>

Penyebaran Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2021 ini mengalami lonjakan yang signifikan, terbanyak di Kecamatan Pedurungan sejumlah 3.409 orang sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Tugu 518 orang.



Gambar 1. 2 Perkembangan UMKM Kota Semarang

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Dilihat dari perkembangan yang ada di Kota Semarang seharusnya sektor ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah setempat, agar diberikan ruang khusus untuk peningkatan kualitas dan menumbuhkan daya saing yang kuat di era yang serba digital.

Karena kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ternyata tidak merepresentasikan kontribusi UMKM terhadap pajak yang dialokasikan. Badan Kebijakan Fiskal mengutarakan terdapat pada tahun 2011 terdapat sumbangan yang dilakukan PDB pada angka 57% dan untuk sektor UMKM terdeteksi hanya melakukan sumbangan 0,5% yakni pajak yang diterima dan terdapat dalam 2014 hanya 5%.Regulasi terkait UMKM terdapat pada PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final (jika ada sewa gedung/ kantor, omzet penjualan, dan lain - lain), PPh pasal 21 (jika memiliki pegawai), PPh pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa), dan pajak daerah.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Dua menyelenggarakan program *Business Development Service* (BDS) yang diperuntukkan kepada pelaku UMKM dengan tujuan agar usaha yang dikelola Wajib Pajak dapat berkembang pesat khususnya melalui pemasaran *online*. Pelaku UMKM yang hadir dalam kegiatan tersebut diberikan edukasi mengenai pajak, seperti turunnya tarif pajak UMKM terbaru 1% menjadi 0,5%

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang diterbitkan untuk menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PMK 197/ 2013. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2018 dengan tujuan menggiatkan para pelaku UMKM.

Faktor utama diberlakukannya peraturan tersebut yakni diharapkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak untuk negara. Pengenaan pajak 0,5% tersebut hanya berlaku dalam batas waktu tertentu. Sedangkan Wajib Pajak orang pribadi diberikan batas waktu hingga 7 tahun, Koperasi/ Persekutuan/ Komanditer selama 4 tahun, dan untuk Wajib Pajak badan bentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut maka para pelaku UMKM diharapkan telah memiliki pembukuan yang baik sehingga dapat membayar pajak sesuai tarif umum berdasarkan Undang – Undang PPh.

Berdasarkan dari data Kantor Wilayah Jawa Tengah I tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2018 sampai 2022 di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Kota Semarang mengalami penurunan yang menonjol dibandingkan sebelum memasuki Pandemi Covid-19. Berikut data Wajib Pajak yang ada di Kota Semarang:

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Barat

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat kepatuhan
2018	89.611	11.191	39.591	4.172	43,41%
2019	95.450	12.115	41.405	4.461	42,64%
2020	106.463	13.931	47.331	4.203	42,80%
2021	142.089	14.997	46.090	4.393	32,14%
2022	145.654	15.291	41.021	4.360	28,20%

Sumber: Kanwil DJP I Jawa Tengah

Tabel 1. 2 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Candisari.

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat kepatuhan
2018	108.968	11.435	48.743	3.843	43,67%
2019	115.288	12.168	50.821	4.407	43,33%
2020	128.590	14.136	47.848	3.813	36,20%
2021	156.425	15.106	51.272	4.267	32,38%
2022	159.676	15.427	46.157	3.939	28,61%

Sumber: Kanwil DJP I Jawa Tengah

Tabel 1. 3 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Tengah.

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat kepatuhan
2018	17.663	4.373	9.235	1.994	50,96%
2019	18.440	4.689	9.538	2.084	50,25%
2020	20.567	5.244	9.552	1.675	43,50%
2021	24.735	5.435	9.768	1.535	37,46%
2022	25.157	5.512	8.895	1.489	33,86%

Sumber: Kanwil DJP I Jawa Tengah

Tabel 1. 4 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat kepatuhan
2018	9.023	7.985	4.496	3.223	45,38%
2019	9.433	8.609	4.648	3.425	44,75%
2020	10.521	9.640	4.762	3.112	39,06%
2021	114.323	10.290	31.538	3.371	28,01%
2022	116.862	10.521	30.081	3.248	26,16%

Sumber: Kanwil DJP I Jawa Tengah

Tabel 1. 5 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Selatan.

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat kepatuhan
2018	18.885	3.308	8.260	1.070	42,04%
2019	19.869	3.531	9.015	1.153	43,45%
2020	22.161	4.426	9.378	1.157	39,62%
2021	26.923	4.596	9.323	1.144	33,21%
2022	27.408	4.648	9.282	1.211	32,73%

Sumber: Kanwil DJP I Jawa Tengah

Tabel 1. 6 Kepatuhan Wajib Pajak Kota Semarang KPP Pratama Semarang Timur.

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat kepatuhan
2018	41.496	4.765	19.932	1.776	46,93%
2019	43.739	5.056	22.812	1.876	50,60%
2020	48.785	6.506	21.545	1.754	42,14%
2021	63.362	6.741	22.808	1.785	35,08%
2022	64.517	6.857	22.899	1.712	34,48%

Sumber: Kanwil DJP I Jawa Tengah

Sejak pandemi Covid – 19 masuk ke Indonesia khususnya di Kota Semarang telah memunculkan masalah yang harus dihadapi oleh UMKM, seperti penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga bisa berdampak terhadap menurunnya tingkat penjualan bahkan banyak UMKM yang gulung tikar. Ketika hal tersebut terjadi, maka UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan. Salah satunya adalah pajak. Sehingga untuk mendongkrak UMKM agar tetap *going concern* melalui penurunan nilai tarif pajaknya, pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus. Jadi, tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak tetap terjaga.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak.⁵ Kepatuhan pajak yang masih rendah merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, sehingga berdampak pada rendahnya *ratio* penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Farouq menyimpulkan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employers*), atau etika (*code of conduct*). Berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5%.

⁵ Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3, (2013), h. 999 – 1008.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai pendekatan kepada para pelaku UMKM dengan mencoba memberikan bantuan untuk mengembangkan bisnisnya. Kementerian Keuangan mengakui saat ini kontribusi pajak UMKM masih sangat kecil terhadap total penerimaan negara. Meskipun demikian, dari sektor UMKM dipercaya memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak. Sehingga untuk mencapainya, Dirjen Pajak akan berupaya mengoptimalkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan fiskus kepada Wajib Pajak.⁶

Selain meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, skema kebijakan tersebut juga diharapkan bisa mendorong perekonomian mereka atau mengembangkan usahanya. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode – metode yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut, kegiatan ini harus dilakukan secara efektif dan rutin. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya.⁷

Selain sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Seorang fiskus memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT.⁸ Pelayanan fiskus yang kooperatif, jujur, menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan Wajib Pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pendapat Nurmantu mengenai Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang yakni kualitas petugas pajak menentukan efektivitas Undang – Undang dan peraturan perpajakan. Adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar taat pajak.

Selain kedua faktor tersebut, faktor yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu pelaksanaan *self assessment system*. Dalam pelaksanaan *self assessment system*,

⁶ Farouq, *Loc.cit.*

⁷ Rohmawati, et. al, “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak”, *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, (Madura: 2013), h. 4.

⁸ Andinata, et. al, “Analisis Faktor – faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4 No. 2, 2015, h. 5.

Wajib Pajak memiliki peranan yang penting karena Wajib Pajak diwajibkan untuk melaksanakan pajaknya secara mandiri seperti perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak hanya dituntut untuk mengerti dan memahami peraturan perpajakan, melainkan juga administrasi dan prosedur perpajakan. Kesadaran masyarakat atau kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang penting dalam proses berjalannya pelaksanaan *self assessment system*.⁹

Selain dari ketiga faktor di atas, ada hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah Pendapatan. Tingkat pendapatan memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.¹⁰

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang setiap tahunnya mencatat adanya pertumbuhan sekitar 2000 UMKM. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan UMKM di Kota Semarang yang dapat membantu perekonomian Ibu Kota Jawa Tengah. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga memberikan pendampingan dalam setiap berkembangnya UMKM tersebut, baik dari segi penataan administrasi hingga manajemen pemasarannya. Dengan adanya peningkatan pada setiap tahunnya, maka terdapat kemajuan positif dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam penerimaan pajak dari sektor UMKM.¹¹

Dari data penjelasan mengenai kajian latar belakang diatas banyak terjadi *inkonsestensi* dalam variabel-variabel yang akan dibahas oleh peneliti. Data yang digunakan penulis merupakan data gabungan dari Kanwil DJP Jateng I pada tahun 2018-2022 dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang pada tahun 2019-2021. Penulis mengembangkan variabel pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi covid-19.

Dan berdasarkan kajian dan *research gap* yang dikemukakan, maka peneliti bermaksud mengusulkan penelitian berjudul, **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid - 19.”**

⁹ Simanjuntak, et. al. *Loc.cit*.

¹⁰ Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. 4 No. 7, h. 9.

¹¹ www.jateng.antarnews.com, (diakses pada 27 Januari 2022 pukul 20:15 WIB)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
4. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Saya harap nanti penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Direktorat Jenderal Pajak

Bermanfaat untuk sarana pengetahuan dengan pemahaman atas banyak strategi-strategi dan metode-metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan sekaligus solusi memecahkan beberapa *problem* yang belum terselesaikan.

b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat untuk sarana pengetahuan dan wawasan terkait patuh pajak yang dimana nantinya juga Kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, sumber dana negara dan kepentingan-kepentingan keperluan negara.

c. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait perpajakan sehingga dapat mengaplikasikan di praktik nyatanya yaitu Wajib Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik data dan metode analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan, keterbatasan penulis, dan kritik serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Proses penyusunan penelitian ini melibatkan beberapa teori sebagai landasan dasar, yaitu:

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori ini berisikan tentang substansi dasar asumsi manusia yaitu manusia merupakan makhluk yang diberikan kelebihan dalam berfikir dan menentukan pilihan-pilihan yang menurutnya baik dan benar untuk dirinya dibanding makhluk hidup lainnya. Setiap manusia selalu mempertimbangan langkah yang akan di ambil sebelum melakukan tindakanya dan kemudian mereka akan memilih apakah akan me langkah mengambil tindakan atau justru tidak jadi mengambil tindakan tersebut.¹² Sedangkan Ajzen berpendapat *Theory of Planet Behavior* adalah *theory* yang menyatakan di mana setiap manusia didalam menentukan pilihanya berdasarkan niat dan segala tindakan yang dipilih sudah dilalui dari proses pertimbangan orang tersebut.¹³

Menurut Andayani, *Theory of Planned Behavior* merupakan kajian *theory* yang membahas terkait langkah yang akan diambil atau tindakan manusia yang akan dipilih dan dibahas secara spesifik. *Theory of Planned Behavior* merupakan penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action*. *Theory of Planned Behavior* berfokus pada *intention* atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu.¹⁴ Sedangkan Frey dalam Simanjuntak, berpendapat jika adanya faktor utama pada kepatuhan Wajib Pajak mengacu dari teori moral pajak (*tax morale theory*) yang berisikan motivasi intrinsik seseorang sebelum melakukan tindakan harus mempertimbangkan nilai moral dan tentunya berlandaskan norma atau regulasi yang mengacu alasan kenapa diwajibkan untuk patuh pajak bagi wajib pajak.¹⁵ Berikut ini akan di sebutkan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap, *tax morale theory*:

- a. Nilai kejujuran;
- b. Sikap membantu atau melayani dari aparat;
- c. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah;

¹² Astuti, et. al. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas Rumah Kos (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)," *Jurnal Nominal*, Vol. 5 No. 1, h. 6.

¹³ Seni Anggar, dkk. "Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 2017. h. 4043-4068

¹⁴ Mahyarni. Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku); *Jurnal El-Riyasah*, Vol.4 No. 1; 2013

¹⁵ Ratna sari, dkk. "Gender Memoderasi Pengaruh *Love of Money* Terhadap Tax Evasion Tendency; *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 12 No. 2; 2019

- d. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak (*respect*);
- e. Sifat lainnya yang melekat pada seseorang.

Theory of Planned Behavior pada penelitian ini merupakan pemahaman terkait sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang Wajib Pajak bertujuan untuk patuh dan taat sebagai warga negara terhadap kewajibannya yaitu melakukan pembayaran pajak. Setiap tindakan yang diambil oleh seseorang, Wajib Pajak mempunyai kesadaran dan keyakinan jika pajak yang dipungut tidak terlepas demi anggaran negara dalam mengupayakan kesejahteraan seluruh warga negara.

Regulasi dan Undang-Undang Perpajakan sengaja dibuat untuk mendisiplinkan dan menanamkan kesadaran wajib pajak jika tidak melaksanakan kewajibannya. Salah satu sanksi pajak yaitu *control beliefs*. Sanksi pajak menjadi alat pemerintah untuk menertibkan Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan sekaligus mejadi efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak patuh pajak.

2.1.2 Teori Kognitif

Teori Kognitif adalah kajian teori yang membahas terkait psikologi terhadap proses pemahaman yang berdasarkan pada proporsi, dimana dalam proses ini kognitif dan sosial diperlukan pengkajian terkait pemahaman mengenai emosi, motivasi, dan sikap seseorang. Teori ini mengonseptualisasikan manusia ke dalam tiga variabel yang saling memengaruhi (*triadic reciprocity*) yaitu manusia sebagai sepenuhnya manusia (*autonomoous agency*), manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan (*mechanical agency*), dan manusia yang tindakannya memengaruhi manusia lain (*emergent interactive agency*).¹⁶

Teori kognitif yang dilakukan Bandura tersebut menjadikan pengetahuan jika seseorang dapat memperoleh ilmu dan wawasan dari orang lain, lingkungan sekitar, dan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang.

Keputusan Wajib Pajak untuk mematuhi aturan perpajakan erat kaitannya dengan persepsi Wajib Pajak. Persepsi tersebut dapat terbentuk dari pengetahuan yang diperoleh sendiri, berdasarkan pengamatan, dan pengalaman sesuai dengan teori kognitif. Sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* merupakan variabel yang dapat dipersepsikan dari proses pembelajaran kognitif yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

¹⁶ Didi Tarsidi, "Konseling untuk Penyesuaian Psikologis terhadap ehilangan Penglihatan pada Individu Tunanetra Dewasa", *Jurnal PLB FIP*, Vol. 8 No. 1, h. 3.

2.1.3 Pajak

Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan kata pajak sudah diatur dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian diatas memberikan penjelasan terkhusus untuk Lembaga pemerintahan sebagai landasan supaya dapat menjelaskan atau menerangkan terkait perpajakan terutama berkaitan antara Wajib Pajak pribadi dan Wajib Pajak badan.

Soemitro menerangkan yaitu pajak merupakan kekayaan yang dimiliki negara dan menjadi kas negara, bersumber dari hasil pemungutan dari warga negara yang melakukan pembayaran sesuai regulasi yang diatur dan surplusnya sebagai *public saving* berguna dana utama untuk melakukan pembiayaan *public investment*. Pajak adalah kas utama milik negara yang berfungsi sebagai dana pokok untuk pembiayaan negara dalam merealisasikan kesejahteraan bangsa. Banyaknya pajak yang harus dibayarkan untuk negara tentu akan berpengaruh terhadap pengeluaran negara, dalam bentuk pembiayaan untuk pembangunan maupun membiayai anggaran rutin. Sehingga, negara dapat menerima pajak yang terkumpul dengan nominal besar, maka perlu adanya beberapa strategi-strategi dan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan edukasi untuk Wajib Pajak dan terus memperbaiki service dari pelayan petugas pajak itu sendiri.¹⁷

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk pengambaran seseorang Wajib Pajak yang selalu mematuhi segala bentuk regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah yang mengatur perpajakan guna memenuhi kewajiban dan haknya.¹⁸ Terdapat dua macam kepatuhan perpajakan yaitu formal dan material. Kepatuhan formal yaitu bentuk ketaatan Wajib Pajak guna menjalankan tanggung jawabnya melakukan pembayaran pajak seperti yang sudah disebutkan dalam ketetapan Undang-Undang yang mengatur terkait Perpajakan. Kemudian kepatuhan material yaitu bentuk ketaatan Wajib Pajak guna memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara yang patuh dan taat

¹⁷ Simanjuntak, et. al., *Loc.cit.*

¹⁸ Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005, h. 148 – 149.

melakukan pembayaran pajak seperti yang sudah disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang yang mengatur terkait Perpajakan. Menurut Undang-Undang No.16 pasal 1 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berisikan “Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak pribadi dimata hukum tetap sama yaitu berkewajiban melakukan pembayaran pajak pada ketentuan regulasi UU Perpajakan yang sudah disahkan dan berlaku”.¹⁹ Tingkat kepatuhan wajib pajak apabila mengalami penurunan menjadi sangat penting karena ketidakpahaman perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak pada kas negara Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 untuk menghitung tingkat kepatuhan, Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang tergolong sebagai patuh pajak sesuai kriteria dibawah ini:²⁰

- a. Data indentitas SPT lengkap dan benar;
- b. Melapor SPT dengan disiplin tepat waktu;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak;
- d. Tidak mendapatkan teguran atau sanksi dari pusat.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An – Nur ayat 54:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Artinya:

“Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan Rasul – Nya: Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepada – Nya niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas”.”

Maksud dari ayat yang dituliskan di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada umat muslim untuk taat kepada – Nya dan kepada Rasul – Nya (Muhammad). Rasulullah SAW. mengajarkan kepada semua umat untuk taat akan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu, umat muslim berkewajiban mematuhi semua aturan termasuk membayar pajak untuk kebaikan dirinya dan negaranya.

¹⁹ Dwiymoko Pujiwidodo, “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Jurnal online Insan Akuntan, Vol 1(1) hal 92-116

²⁰ Kementerian Keuangan, www.jdih.kemenkeu.com, (diakses pada tanggal 17 April 2022 pukul 21:17 WIB)

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, telah menyatakan jika sosialisasi terkait perpajakan merupakan salah satu bentuk upaya dan pilihan pemerintah dalam melakukan strategi untuk mengedukasi masyarakat terutama Wajib Pajak yang belum paham terkait regulasi perpajakan, sehingga kemudian menjadikannya paham dan sadar atas kewajibannya melakukan pembayaran pajak sebagai warga negara yang baik. Sosialisasi perpajakan adalah bentuk tindakan pemerintah dalam memberikan arti, penyampaian terkait pajak, dan melakukan arahan untuk warga negara dan melakukan edukasi secara universal yang mengatur perpajakan dan segala regulasi yang harus di patuhi..²¹

Pemerintah harus mengetahui betapa pentingnya sosialisasi perpajakan karena niat masyarakat semakin rendah dalam hal penghindaran pajak, maka perlunya usaha meningkatkan kesadaran dan patuh untuk lebih peduli terhadap pajak. Pemerintah juga perlu membuat program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak tentang kegiatan penyuluhan seperti, mengadakan kegiatan seminar ke berbagai profesi dan membuka sarana pelatihan baik internal pemerintah sendiri maupun swasta, menyebarkan informasi perpajakan melewati media televisi dan bekerjasama dengan masyarakat, mengadakan kerjasama dengan universitas-universitas yang diisi dengan berbagai acara menarik.

2.1.6 Pelayanan Fiskus

Pelayanan ini merupakan proses pelayanan yang bertujuan untuk menawarkan bantuan untuk mengurus keperluan yang seseorang butuhkan. Kemudian, fiskus sendiri yaitu petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak.²² Menurut Nasution Pelayanan Fiskus merupakan petugas yang harus patuh dan taat pada regulasi pajak. Fiskus bertanggung jawab memiliki sikap ramah, sifat empati, bisa membantu, pelayanan bagus, dan kejujuran melekat pada dirinya sehingga hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat dan masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak tidak

²¹ Dharma, G.P.E., dan K.A. Suardana. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 1; 2014. h.340-353

²² Muslimah, "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel *Intervening* Kepuasan Wajib Pajak", *STIE Sutaatmadja Subang*. Vol. 01 No. 01; 2020. h.81-89

akan merasa takut atau enggan.²³ Pengaruh dari petugas pajak merupakan faktor utama Wajib Pajak merasa nyaman untuk membayar pajak.

2.1.7 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan kegiatan pengumpulan pajak dimana proses yang dikerjakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak terhutang. Farouq berpendapat bahwa *self assessment system* yang dilaksanakan yaitu program pajak yang dikumpulkan dan Wajib Pajak diberikan kekuasaan untuk melakukan perhitungan, melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan pajak yang ditanggung kepada Wajib Pajak sesuai regulasi dan undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam membayarkan pajaknya.

Dengan konsekuensi masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan peraturan pemenuhan perpajakan.²⁴ Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka dikhawatirkan sistem ini akan dapat menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak dalam melakukan tindak kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan pajak yang harus dibayarkan. Ciri – ciri sistem ini adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak berhak untuk menentukan besarnya pajak terutang;
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang;
- c. Pemerintah/ petugas tidak dapat ikut campur dalam mengetahui pajak terutang Wajib Pajak dan hanya bisa mengawasi.

2.1.8 Pendapatan

Pendapatan adalah pencapaian terbaik dalam proses penyusunan laba-rugi pada suatu lembaga. Masih ada yang tidak mengerti arti dari pendapatan. Maksud dari hal tersebut bahwa pendapatan memiliki arti sebagai *revenue* dan bisa dimaknai sebagai *income* yaitu pencapaian atas kerja kerasnya dan kata *revenue* merupakan bentuk keuntungan atau penghasilan.

Sedangkan Paul A. Samuelson mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil yang didapatkan seseorang dan biasanya pendapatan berupa uang yang diberikan setelah

²³ Nasution, *Perpajakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 47.

²⁴ Aryani, "Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No. 7. 2020.

menyelesaikan kerja kerasnya (biasanya satu tahun).²⁵ Pendapatan terbagi dalam beberapa kategori yaitu gaji atas kerjanya, uang dari hasil sewa, dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik berupa bantuan prakerja untuk seseorang usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan. Pendapatan merupakan banyaknya uang yang didapatkan dalam kurun waktu tertentu atas kerja kerasnya, sewa rumah.²⁶

Masalah pendapatan tidak hanya dilihat dari jumlahnya saja, tetapi bagaimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Adapun faktor – faktor yang memengaruhi arah gejala distribusi pendapatan dan pengeluaran di Indonesia, diantaranya:

1. Mendapatkan strategi produksi yaitu lahan atau modal awal
2. Mendapatkan pekerjaan untuk seseorang yang tidak memiliki usaha atau tidak memiliki lahan
3. Pergerakan produksi pada desa yaitu pada kasus ini faktor utamanya merupakan produksi dan besaran nominal atau harga produk.

2.1.9 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Maharani mengatakan yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadikan faktor utama pada sektor ekonomi warga negara. UMKM menjadi unit usaha yang membantu menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Periode krisis moneter melanda pada 1998 banyak masyarakat yang terbantu adanya UMKM sehingga dianggap sebagai penyelamat dari bertambahnya angka kemiskinan.

Penyaluran pajak bersumber dari UMKM memiliki pengaruh signifikan, sehingga hal ini mengundang simpatik dari pemerintah, kemudian pada 2018 pemerintah mencetuskan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP No 46 tahun 2013 terkait Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. PP Nomor 23 tahun 2018 mengarah kepada UMKM dengan acuan pengenaan pajak yaitu omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, pajak yang bersifat final dengan tarif 0,5 %.

²⁵ Iskandar, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa”, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol 1 No 2. 2017.

²⁶ Fadilah Lutfah, dkk. “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 2 2021. h. 452

UMKM adalah unit usaha yang berkewajiban mentaati dan patuh terhadap pajak sesuai regulasi yang berlaku, seperti berikut:²⁷

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- c. Membayar atau menyetor pajak;
- d. Membuat pembukuan atau pencatatan;
- e. Menaati pemeriksaan pajak;
- f. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;
- g. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak
- h. Membayar bea materai atas dokumen.

Proses perpajakan yang birokratik dan sulit dipahami oleh pelaku UMKM yang tidak semua memiliki latar belakang pendidikan tinggi memberikan dampak negatif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan rendahnya kepatuhan para pelaku UMKM berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya:

- a. Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan, sebagian besar pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan. Salah satu faktor dari timbulnya ketidakpedulian tersebut dikarenakan oleh ketidakpahaman atas ketentuan – ketentuan yang berlaku.

- b. Pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa – usaha (*self employment*).

Jenis pelaku usaha ini memiliki karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan dengan karyawan, di mana penghasilan yang dibayarkan tersebut telah dipotong pajak (*withholding*). Orang pribadi swa – usaha akan melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dalam SPT. Namun, masih awamnya pelaku UMKM mengenai perpajakan menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh.

- c. Pelaku UMKM biasanya bergerak di sektor informal, sehingga mengenai catatan dan transaksi yang dilakukan tersebut relatif tidak ada. Hal tersebut memberikan kesulitan bagi administrasi pajak untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM.

²⁷ Teguh Setiawan, “Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008”, *Journal of Social Science and Bussiness*, 2019, h. 5 – 7.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisa	Hasil Penelitian
1	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2018)	Satyawati, dkk	<i>Self Assessment System</i> (X_1), Sistem Informasi (X_2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis regresi linear berganda	<i>Self Assessment System</i> dan Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh positif (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (2017)	Andriani, dkk	Sosialisasi Pajak (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), Tingkat Pendidikan (X_3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisa regresi linear berganda	Sosialisasi terkait Pajak dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh (+) dan Tingkat Pendidikan berpengaruh (-) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Tanah Abang
3	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Tingkat Pendidikan, dan	Maharani	<i>Self Assessment System</i> (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), dan Pelayanan Fiskus (X_3),	Analisis regresi linear berganda	<i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan, Tingkat Pendidikan berpengaruh (+) signifikan, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan

	Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru (2018)		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)		Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru
4	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan <i>Self Assessment System</i> terhadap Kesadaran Wajib Pajak serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan (2016)	Inggrid, dkk	Pengetahuan Perpajakan (X_1), Pengaruh <i>Self Assessment System</i> (X_2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	SPSS	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan, Pengaruh <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Wajib Pajak
5	Pengaruh Kesadaran Perpajakan,	Stefani, dkk	Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi	Regresi linear berganda	Kesadaran Perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

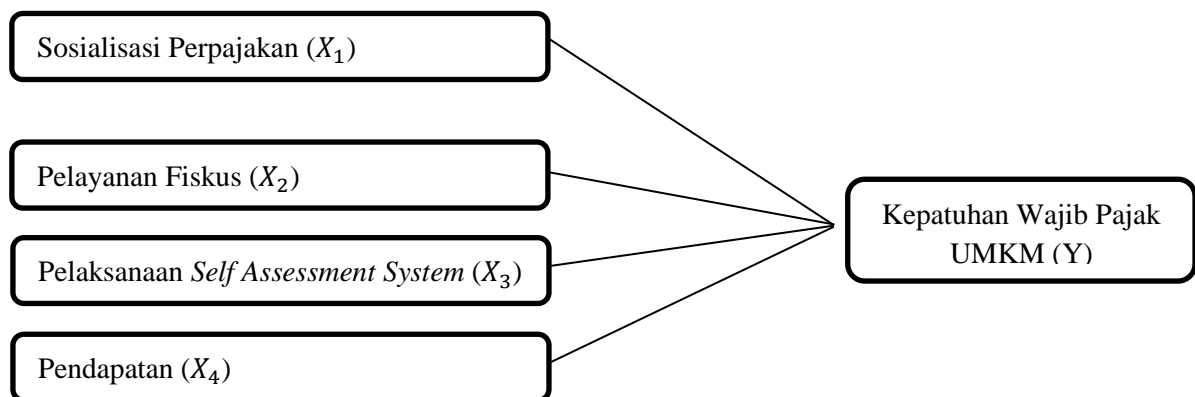
	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (2018)		Perpajakan (X_2), Pelayanan Fiskus (X_3), Sanksi Perpajakan (X_4), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)		orang pribadi, Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
6	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (2019)	Yulita, dkk	Sosialisasi Perpajakan (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), Tingkat Pendidikan (X_3), Wajib Pajak UMKM (Y)	Regresi linear berganda	Sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara stimulan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan berdasarkan hasil Uji F (stimulan).
7	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada <i>Self Assessment System</i> di	Dinar Ayu, dkk	Pengetahuan tentang Subjek Pajak (X_1), Pengetahuan tentang Objek Pajak (X_2), Pengetahuan tentang Perhitungan Pembayaran	Regresi Berganda	Pengetahuan pajak yang terkait <i>Self Assessment System</i> , yakni pengetahuan tentang subjek pajak, pengetahuan tentang objek pajak, pengetahuan tentang perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, pengetahuan tentang pemeriksaan pajak, dan

	Indonesia (2021)		dan Pelaporan Pajak (X_3), Pengetahuan tentang Pemeriksaan Pajak (X_4), Pengetahuan tentang Sanksi dan Denda (X_5), Kepatuhan Total (Y)		pengetahuan tentang sanksi dan denda, secara simultan berpengaruh signifikan positif dengan <i>magnitude</i> sebesar 13 – 14% ($p < 0,05$) terhadap perilaku kepatuhan perpajakan.
8	Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Tingkat Pendekatan sebagai Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (2020)	Hari Setyo, dkk	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Membayar Pajak (X_2), Tingkat Pendapatan UMKM (X_3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Regresi linear berganda	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya bahwa peningkatan pemahaman peraturan perpajakan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya bahwa kesadaran membayar pajak tidak sejalan atau belum dapat memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tingkat Pendapatan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

					UMKM. Artinya semakin tinggi pendapatan maka dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil uji analisis tambahan yang dikelompokkan menurut omzet usaha (Mikro, Kecil, dan Menengah) maka usaha kecil yang paling dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
--	--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian bertujuan memberikan informasi yang menerangkan tingkat patuh Wajib Pajak yaitu unit usaha milik UMKM dari hasil tinjauan dari sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pendapatan UMKM. Kerangka berfikir dalam penulisan ini bertujuan sebagai bentuk pemahaman secara sederhana, sistematis dan tentunya memudahkan dalam melihat alur berpikir. Berikut ini kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

X : *Independent variable* (variable independen)

Y : *Dependent variable* (variable dependen)

→ : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pendapatan secara sendiri-sendiri Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

→ : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pendapatan secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih membutuhkan pembuktian baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian ini terdapat empat hipotesis penelitian yang akan dibuktikan terkait hubungan antara variabel independen (sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, pendapatan) dan variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak).

2.4.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Normative beliefs sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavior* juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, di mana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain. Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah, khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi keyakinan Wajib Pajak untuk memotivasi agar menjadi perilaku taat pajak.²⁸ Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Normative beliefs juga menjadi faktor penentu niat dari hasil pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus merupakan hal pertama yang akan dihadapi oleh Wajib Pajak ketika akan memenuhi kewajibannya di kantor pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas dan sesuai dengan aturan – aturan perpajakan menjadi dorongan yang memberikan

²⁸ Marjan, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanudin, 2014, h. 25.

keyakinan kepada Wajib Pajak akan terbantu dan dimudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.²⁹

H₂: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.4.3 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Behavior beliefs merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, di mana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku baik dan kurang baik. Ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya.³⁰ Menurut Simanjuntak, dkk (2012: 83 – 84) kesadaran masyarakat atau kepatuhan pajak seyogyanya menjadi hal utama dalam proses berjalannya pelaksanaan *Self Assessment System*. Penelitian tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) yang menyebabkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃: Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Faktor lain yang dianggap memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah pendapatan. Faktor pendapatan merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat miskin merasa kesulitan membayar pajak. Bagi sebagian besar UMKM, pajak masih dianggap sebuah beban dan biaya yang harus menjadi tanggungan dalam kegiatan ekonominya.

Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam perekonomian yang berperan meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa.³¹ Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi – prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha program perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.³²

²⁹ *Op.cit.*, h. 34.

³⁰ Marjan, *Loc.cit.*

³¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 1998, Jakarta: Gema Insani Press, h. 102.

³² Sadono Sukimo, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, h. 47.

Menurut Ernawati (2014), masyarakat miskin akan menemukan kesulitan membayar pajak. Pendapatan juga salah satu unsur yang paling utama dalam pembentukan siklus yang sehat dalam perusahaan, yang di mana ini sangat berpengaruh kepada daya bayar pajaknya. Penelitian tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hari Setyo dan Dian Purnama Sari (2020) serta Putri (2015) yang menyatakan bahwa faktor tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah:

***H₄*: Pengaruh Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan data yang valid.³³ Cara ilmiah berarti penelitian tersebut didasari pada keilmuan, yaitu sistematis, rasional, dan empiris. Sistematis merupakan penelitian yang bersifat logis. Rasional berarti penelitian tersebut menggunakan cara – cara yang masuk akal, sehingga mudah dipahami oleh penalaran manusia. Empiris yakni menggunakan bukti atau data yang relevan sehingga dapat dipahami oleh indra manusia.³⁴

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa jenis penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data informasi yang memberikan penjelasan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan sebuah penelitian. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Darmawa, mengungkapkan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data informasi yang disesuaikan dengan keinginan peneliti berdasarkan masalah yang dimunculkan oleh peneliti.³⁵

3.2 Data Penelitian

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data dalam penelitian berasal dari berbagai sumber dan dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti. Penelitian ini menggunakan dua jenis data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan wawancara serta menggunakan kuesioner secara langsung kepada responden. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Semarang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, serta yang tidak terdaftar tetapi masih dilingkup Kota Semarang.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2010, h. 7.

³⁴ Amos Neolak, *Metode Penelitian dan Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 17.

³⁵ Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, h. 12.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder berbeda dengan data primer, di mana data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti sedangkan data sekunder merupakan data atau informasi yang bersifat publik diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.³⁶ Data yang diperoleh dari penelitian tidak langsung ini meliputi buku – buku, penelitian sebelumnya, jurnal – jurnal, dari situs badan – badan terkait. Dalam penelitian ini data bersumber dari KPP yang menaungi wilayah kerja Kota Semarang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Semarang. Dan diketahui data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebanyak 28.503 pelaku UMKM per awal tahun 2022.³⁷

3.3.2 Sampel

Teknik dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu.³⁸ Sampel dalam penelitian ini juga dihitung menggunakan rumus Slovin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Margin kesalahan/ batas toleransi kesalahan

Diketahui perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{28.503}{1 + 28.503 \cdot (0,1)^2}$$

$n = 99,65 =$ dibulatkan menjadi 100.

³⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 105.

³⁷ Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

³⁸ Siyoto, et. al., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 54.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut sampel minimal yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang diambil dari populasi dengan jumlah 28.503 UMKM.

Objek penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Semarang, ditentukan berdasarkan kriteria – kriteria berikut:

- a. UMKM yang berada di bawah wilayah kerja Kanwil I (Kota Semarang);
- b. UMKM yang pendapatannya lebih dari Rp.500.000.000,00 – Rp. 5.000.000.000,00.
- c. UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi & UMKM Kota Semarang
- d. UMKM yang tidak terdaftar tetapi masih dilingkup Kota Semarang

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Kuesioner

Teknik analisis yang menggunakan kuesioner diukur dengan skala *likert*.⁴⁰ Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pilihan Jawaban dalam Kuesioner

Nama	Singkatan	Nilai
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Kurang Setuju	KS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

b. Dokumentasi

Berdasarkan pendapat Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain – lain. Dokumen yang berbentuk karya

³⁹ *Op.cit.*, h.125.

⁴⁰ Sugiyono, *Loc.cit.*, h. 86 – 87.

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain – lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴¹ Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada KPP Pratama yang berada di bawah Kanwil I Jawa Tengah Wilayah Kota Semarang serta Dinas Koperasi & UMKM Kota Semarang berupa *database*, dokumen, serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data yang berasal dari buku – buku literatur, jurnal – jurnal ilmiah, dan penelitian yang sejenis.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel didefinisikan berupa suatu konstruk atau konsep yang akan dipelajari dalam sebuah penelitian dan diambil kesimpulannya.⁴² Variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

3.5.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel bebas biasanya disebut variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Variabel ini diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

3.5.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Menurut Yusuf dalam *website* penerbit Publish memaparkan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan, memengaruhi serta menerangkan variabel lain dan menyebabkan adanya perubahan pada variabel terikat dan disingkat dengan variabel X .⁴³ Variabel independen biasanya dikatakan sebagai variabel bebas atau variabel yang berpengaruh terhadap perubahan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan variabel independen antara lain *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assessment System dan Pendapatan*.

3.5.2 Definisi Operasional

⁴¹ Sugiyono, *Loc.cit.*, h. 240.

⁴² Suryani, et. al., *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, h. 27.

⁴³ Yusuf, www.penerbitdedpublish.com, <https://www.penerbitdedpublish.com/variabel-bebas-dan-terikat>, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 21:12 WIB.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak	Nurmantu (3005: 148 – 149) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	Wajib Pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Tepat waktu dalam membayar pajaknya. Wajib Pajak mengisi SPT dengan jelas dan akurat. Wajib Pajak paham akan sanksi.	Skala Likert
Sosialisasi Perpajakan	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, telah sosialisasi atau penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses membersihkan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.	Mengetahui adanya Undang – Undang dan ketentuan perpajakan. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Fungsi pajak dalam pembiayaan tersebut bisa berupa beragam fasilitas yang telah dibuat pemerintah seperti sarana publik, sekolah, jalan raya, taman untuk pembangunan nasional. Selain itu pajak juga digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan pembayaran gaji pegawai negara. Semakin tinggi biaya pajak yang dipungut maka pembiayaan pajak akan lebih optimal dan efektif. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan perpajakan Wajib Pajak UMKM didasarkan pada ketentuan yang berlaku.	Skala Likert

Pelayanan Fiskus	Menurut Nasution (2006: 47) petugas pajak (fiskus) adalah orang yang harus menegakkan aturan pada sistem perpajakan.	Memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Wajib Pajak seputar masalah perpajakan. Melayani dan membantu Wajib Pajak. Fiskus memberikan pelayanan secara profesional.	Skala Likert
Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	Farouq (2018: 157 – 158) berpendapat bahwa pelaksanaan <i>self assessment system</i> merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan.	Kemampuan untuk menentukan pajaknya sendiri. Keterbukaan dalam perpajakan.	Skala Likert
Pendapatan	Berdasarkan pendapat Paul A. Samuelson (1992) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).	Mengetahui rata – rata penerimaan pendapatan. Mengetahui kemampuan membayar pajak.	Skala kLikert

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengujian terhadap hipotesis apakah hipotesis tersebut teruji atau tidak teruji kevalidannya.⁴⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dari data yang diperoleh dengan mengukur atau menghitung secara langsung dalam bentuk angka – angka dan kemudian disajikan berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggunakan sistem statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan objek yang telah terkumpul apa adanya tanpa membuat suatu kesimpulan untuk umum.⁴⁵

3.6.1.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.⁴⁶ Sebuah kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan kata lain, uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dari instrumen penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sebuah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mana merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kevalidan atau reliabel serta handal dalam menjawab pertanyaan seseorang dengan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Koefisien reliabilitas $> 0,60$. Untuk suatu instrumen tersebut jika dikatakan reliabel atau handal.⁴⁷

3.6.1.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode One

⁴⁴ Sugiyono, *Loc.cit.*, h. 177.

⁴⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, Divisi sdari Prenada Media, 2014, h. 109 – 110.

⁴⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h. 52.

⁴⁷ *Ibid*, h. 47 – 53.

Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) yang dapat dilihat melalui perbandingan nilai signifikansi. Syarat suatu model regresi untuk dapat memenuhi asumsi normalitas jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.⁴⁸ Akan tetapi, apabila hasil signifikasinya $< 0,05$ maka data tersebut terbelang tidak terdistribusi secara normal.⁴⁹

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan antar variabel independen dalam satu model regresi. Model regresi yang baik yakni yang tidak bermasalah dengan model multikolinieritas. Nilai *tolerance* dan *Varian Inflation Factor* (VIF) untuk melihat uji multikolinieritas.⁵⁰

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas merupakan apabila satu varian pengamatan ke pengamatan lainnya tetap dan apabila varian pengamatannya berbeda disebut homoskedastisitas. Menurut Ghozali apabila nilai signifikasinya $> 0,05$ maka dinyatakan model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai signifikasinya $< 0,05$ dapat dinyatakan bermasalah dengan heteroskedastisitas.⁵¹

3.6.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dari variabel independen/variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Digunakannya uji regresi linear berganda adalah dengan maksud mengetahui arah hubungan variabel dependen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel bebas atau independen berhubungan positif atau negatif dan memprediksi nilai variabel terikat dan

⁴⁸ Gun Mardiatmoko, "Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]) The Importance of the Classical Assumption Test in Multiple Linear Regression Analysis (A Case Study Of", Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan, 14.3 (2020), 333–42.

⁴⁹ Romie Priyastama, *Buku Sakti Kuasai SPSS*, Yogyakarta: Star Up, 2017, h. 117.

⁵⁰ Imam Ghozali, *Loc.cit.*, h. 105.

⁵¹ *Ibid*, h. 139.

dependen apakah mengalami kenaikan atau penurunan.⁵² Penelitian ini dilakukan guna membuktikan adanya hipotesis dalam penelitian melalui uji stasistik yang di dukung oleh uji ekonometrika sebagai berikut:

a. Uji *Goodness of Fit* (Uji F)

Uji F disebut uji statistik pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau variabel independen secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Pengambilan keputusan didasar apabila nilai signifikasi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan adanya variabel bebas atau variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau variabel dependen dan dapat dinyatakan bahwa model regresi menunjukkan *fit*. Namun, apabila nilai signifikasinya $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan dapat dinyatakan bahwa model regresi menunjukkan tidak *fit*.⁵³

b. Uji t

Uji t adalah uji statistika untuk mencari perbedaan rata-rata dari populasi yang diwakili oleh sampel.⁵⁴ Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.⁵⁵ Suatu variabel independen dikatakan signifikan secara individu mempengaruhi variabel dependen diukur dengan melihat besarnya nilai Sig. pada tabel *coefficients* apabila nilai Sig. lebih kecil dari 0,05.⁵⁶

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Menurut Ghozali berpendapat bahwa koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat atau variabel dependen. Nilai koefisien determinan R^2 antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila R^2 semakin besar maka hasil untuk model regresi semakin baik. Secara umum, nilai koefisien

⁵² Fl. Sigit Suyantor. *Mengolah Data Stasistik Hasil Penelitian dengan menggunakan SPSS*, Semarang: Wahanan Computer, h. 143.

⁵³ *Ibid*, h. 142.

⁵⁴ Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1st edn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

⁵⁵ Mardiatmoko.

⁵⁶ Ni'mah.

determinan untuk data *time series* (runtun waktu) memiliki nilai koefisien determinan lebih tinggi. Dan untuk data silang (*cros section*) biasanya lebih rendah dikarenakan variasi yang besar antar masing – masing pengamat.⁵⁷

⁵⁷ Imam Ghozali, *Loc.cit.*, 2013, h. 97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Objek Penelitian

Penelitian terjadi karena banyak faktor yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang Pada kondisi Pandemi covid-19. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan.

Saat menggunakan survei untuk mengumpulkan data dalam survei ini, survei dibagikan kepada responden melalui google form dan secara langsung yang merupakan wajib pajak UMKM dan UMKM yang ada di Kota Semarang. Sampel yang digunakan terdiri dari 100 sampel Wajib Pajak UMKM. Dan sampel tersebut digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyebaran kuisisioner pertama akan dilakukan uji perangkat oleh 30 responden, dilanjutkan dengan penyebaran kepada 100 sampel yang telah ditentukan. Ada 4 variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Survei ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui latar belakang responden yang masuk ke dalam kriteria penelitian. Hasil diatribusi sampel ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner yang diterima	101
Kuisisioner yang tidak digunakan	1
Kuisisioner yang digunakan	100

Dari tabel diatas kita lihat bahwa hasil kuisisioner yang dimasukkan dalam formulir adalah 101 sampel, 1 dinyatakan tidak valid. 100 responden dianalisis berdasarkan rumus penentuan sampel.

Tabel 4. 2 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
Laki-laki	53	53%
Perempuan	47	47%
Total	100	100%

Tabel 4.2 diatas menunjukkan, responden yang disurvei, yakni responden Laki-laki diklasifikasikan 53 atau 53% dan responden Perempuan sebanyak 47 atau 47 %. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan.

Tabel 4. 3 Klasifikasi Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
<20 th	7	7%
20-45 th	69	69%
>45 th	24	24%
Total	100	100%

Pada tabel 4.3 klasifikasi responden menurut usia bahwa persentase responden yang berusia <20 tahun adalah 7% dengan jumlah responden antara 20-45 tahun adalah 69%. Jumlah responden berusia >45 tahun sebanyak 24%.

Tabel 4. 4 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentasi
Sarjana	58	58%
SMA-SMP	37	37%
SD	2	2%
Lainnya	3	3%
Total	100	100%

Tabel 4.4 diatas mengungkapkan bahwa data pendidikan responden umkm di Kota Semarang ialah sebesar 3% responden dari kalangan yang tidak lulus dan 2% responder berasal dari SD. Untuk pendidikan tingkat SMA-SMP 37% responden dan untuk pendidikan tingkat Sarjana sebesar 58 %.

Tabel 4. 5 Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah	Presentase
<500jt	61	61%
500jt-2M	32	32%
2M-5M	7	7%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa pendapatan tersebut artinya, 61 atau 61% responden yang berpenghasilan <500 Juta, 32% berpenghasilan 500 Juta – 2 miliar, 7% berpenghasilan 2 miliar – 5 miliar.

4.2 Teknik Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan mengetahui gambaran masing-masing variabel, seperti mean, median, standar deviasi, maksimum dan minimum. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pelaksanaan *Self Assessment System* (X3), Pendapatan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil pengujian data ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Total X1	100	11	9	20	15.32	2.514	6.321
Total X2	100	10	10	20	16.12	2.100	4.410
Total X3	100	12	8	20	15.36	2.218	4.920
Total X4	100	12	8	20	15.44	2.253	5.077
Total Y	100	10	10	20	16.29	1.986	3.945
Valid N (listwise)	100						

Hasil analisis deskriptif diatas dalam penelitian ini dapat dianggap range, minimum, maximum, mean dan *standar deviasi*. Seperti yang dijelaskan dibawah ini :

a. Sosialisasi perpajakan

Hasil analisis stasistik deskriptif terhadap variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan jumlah 100 responden yang diteliti pada tahun 2022 di Kota Semarang. Dalam tabel diatas memperlihatkan variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai range 11, nilai minimum 9, nilai maksimum 20, nilai mean 15.32 dengan *standar deviasi* 2,514.

b. Pelayanan fiskus

Hasil analisis stasistik deskriptif terhadap variabel pelayanan fiskus menunjukkan jumlah 100 responden yang diteliti pada tahun 2022 di Kota Semarang. Dalam tabel diatas memperlihatkan variabel pelayanan fiskus diperoleh nilai range 10, nilai minimum 10, nilai maksimum 20, nilai mean 16.12 dengan *standar deviasi* 2,100.

c. Pelaksanaan *self assessment system*

Hasil analisis stasistik deskriptif terhadap variabel pelaksanaan *self assessment system* menunjukkan jumlah 100 responden yang diteliti pada tahun 2022 di Kota Semarang. Dalam tabel diatas memperlihatkan variabel pelaksanaan *self*

assessment system diperoleh nilai range 12, nilai minimum 8, nilai maksimum 20, nilai mean 15.36 dengan *standar deviasi* 2,218.

d. Pendapatan

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pendapatan menunjukkan jumlah 100 responden yang diteliti pada tahun 2022 di Kota Semarang. Dalam tabel diatas memperlihatkan variabel pendapatan diperoleh nilai range 12, nilai minimum 8, nilai maksimum 20, nilai mean 15.44 dengan *standar deviasi* 2,253.

e. Kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan jumlah 100 responden yang diteliti pada tahun 2022 di Kota Semarang. Dalam tabel diatas memperlihatkan variabel pendapatan diperoleh nilai range 10, nilai minimum 10, nilai maksimum 20, nilai mean 16.29 dengan *standar deviasi* 1,986.

4.2.2 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS untuk melihat signifikansi atau tidaknya suatu korelasi pada kolom atau baris total score. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan pada enam variabel yakni Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pendapatan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Cara menentukan signifikansi tidaknya sebuah korelasi sebagai berikut:

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka kuisioner tersebut dikatakan valid, dengan tingkat signifikansi 0,05.
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ kuisioner tersebut dikatakan tidak valid.

$R \text{ tabel} = N - 2$
$R \text{ tabel} = 100 - 2 = 98 \text{ (0,196)}$
Nilai signifikansi 5% = 0,05

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

Variabel/Indikator	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Sosialisasi perpajakan	1	0,453	0,196	valid
	2	0,378	0,196	valid
	3	0,534	0,196	valid
	4	0,311	0,196	valid
Pelayanan fiskus	1	0,377	0,196	valid
	2	0,400	0,196	valid
	3	0,468	0,196	valid
	4	0,364	0,196	valid
Pelaksanaan <i>self assessment system</i>	1	0,464	0,196	valid
	2	0,547	0,196	valid
	3	0,651	0,196	valid
	4	0,493	0,196	valid
Pendapatan	1	0,689	0,196	valid
	2	0,237	0,196	valid
	3	0,527	0,196	valid
	4	0,664	0,196	valid
Kepatuhan wajib pajak umkm	1	0,614	0,196	valid
	2	0,773	0,196	valid
	3	0,754	0,196	valid
	4	0,762	0,196	valid

Berdasarkan tabel 4.7 diatas hasil pengujian setiap variabel dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam kuisisioner dinyatakan valid, dapat dilihat pada tabel bahwa r hitung > nilai r tabel.

4.2.3 Uji Reliabilitas

Dinyatakan handal atau variabel suatu kuisisioner jika seseorang dalam menjawab suatu pertanyaan stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Teknik *cronbach's alpha* digunakan pada penelitian ini untuk menguji reabilitas. Dinyatakan reliabel suatu variabel apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,60. Pada penelitian ini hasil pengujian reliabilitas yang didapat sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,923	Reliabel
2	Pelayanan Fiskus (X2)	0,924	Reliabel
3	Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> (X3)	0,918	Reliabel
4	Pendapatan (X4)	0,922	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,919	Reliabel

Berdasarkan data tabel 4.8 tersebut dapat diketahui setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka semua variabel pada penelitian ini dapat disimpulkan reliabel.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai Asymp Sig. dengan menggunakan One Sample Kolmogorof-Smirnov Test (K-S). Data dengan nilai signifikansi > 0,05 dapat dinyatakan terdistribusi normal. Tabel hasil dari uji normalitas One Sample Kolmogorof-Smirnov Test (K-S) sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji *One Sample Kolmogrof – Semirnov Test*

Model		Unstandardized Residual
N		30
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.1.18637950
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.066
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut diketahui nilai Asymp Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200, sehingga dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk mengetahui apakah antar variabel bebas atau independen ditemukan korelasi pada suatu model regresi. Uji multikolonieritas pada penelitian ini menggunakan metode *Variance Inflation actors* (VIF) dengan melihat pada tabel *coefficients* dan melihat besarnya nilai *tolerance*. Jika

suatu model memiliki $VIF < 10$ atau nilai *tolerance* $> 0,1$ maka model tersebut dapat dikatakan bebas multikolonieritas.⁵⁸

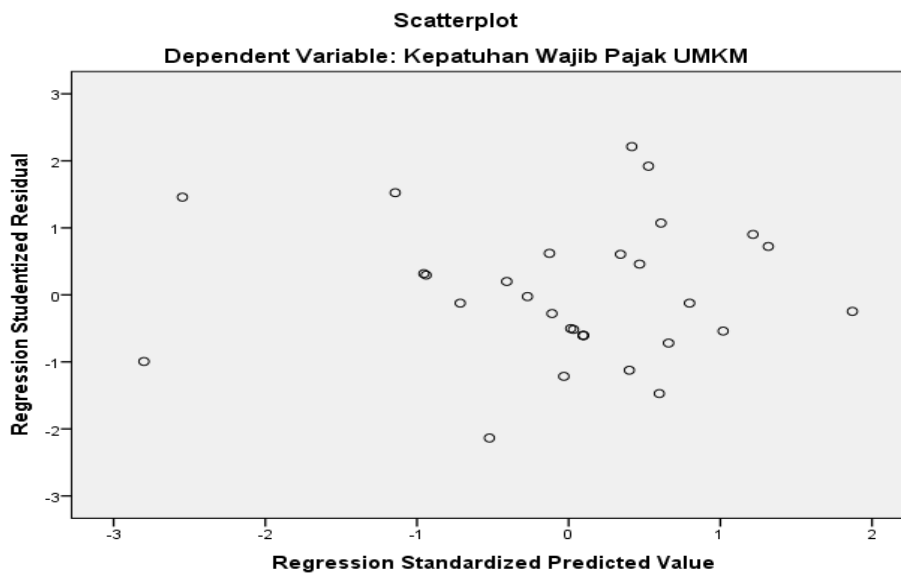
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.395	1.784		1.342	.192		
Sosialisasi Perpajakan	.064	.123	.080	.522	.607	.442	2.260
Pelayanan Fiskus	.190	.135	.205	1.409	.171	.498	2.008
Self Assessment System	.410	.152	.454	2.694	.012	.371	2.697
Pendapatan	.233	.111	.275	2.094	.047	.610	1.639

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, nilai VIF dari setiap variabel diketahui kurang dari 10 serta nilai *tolerance* $> 0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas multikolonieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk membuktikan atau memberitahu bahwa ada atau tidaknya kesamaan varian residual nilai untuk model regresi yang diamati. Peneliti untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dapat dilihat dari hasil uji *scatter plot* dan uji glejser yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Hasil Scatter Plot

⁵⁸ Mardiatmoko.

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan data menyebar ke berbagai bidang, dan diatas maupun dibawah nilai sumbu 0 sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.881	.784		2.399	.018
Sosialisasi Perpajakan	-.018	.048	-.053	-.371	.711
Pelayanan Fiskus	.009	.049	.021	.175	.862
Self Assessment System	-.071	.061	-.183	-1.162	.248
Pendapatan	.023	.051	.062	.461	.646

Pada hasil output diatas dapat diambil keputusan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi karena hasil output lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.

4.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linier regresi berganda memfungsikan dalam mengetahui efek pengaruh langsung secara parsial atau berma-sama untuk setiap variabel yang sama untuk digunakan. Hasil uji regresi linier berganda untuk variabel pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diperhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.395	1.784		1.342	.192
Sosialisasi Perpajakan	.064	.123	.80	.522	.607
Pelayanan Fiskus	.190	.135	.205	1.409	.171
Self Assessment System	.410	.152	.454	2.694	.012
Pendapatan	.233	.111	.275	2.094	.047

Berdasarkan tabel diatas tersebut maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,395 + 0,064(X1) + 0,190(X2) + 0,410(X3) + 0,233(X4)$$

1. Nilai konstanta sebesar 2,395, hal ini menunjukkan apabila variabel Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan dianggap konstan (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang bernilai 2,395.
2. Nilai koefisien variabel sosialisasi perpajakan bernilai positif sebesar 0,064, hal ini berarti apabila ada kenaikan 1% variabel sosialisasi perpajakan akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi covid-19 sebesar 0,064.
3. Nilai koefisien variabel pelayanan fiskus bernilai positif sebesar 0,190, hal ini berarti apabila ada kenaikan 1% variabel pelayanan fiskus akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi covid-19 sebesar 0,190.
4. Nilai koefisien variabel pelaksanaan *self assessment system* bernilai positif sebesar 0,410, hal ini berarti apabila ada kenaikan 1% variabel pelaksanaan *self assessment system* akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi covid-19 sebesar 0,410.
5. Nilai koefisien variabel pendapatan bernilai positif sebesar 0,233, hal ini berarti apabila ada kenaikan 1% variabel pendapatan akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi covid-19 sebesar 0,233.

4.4.1 Uji *Goodness of Fit* (Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui benar adanya atau tidak adanya pengaruh suatu variabel dependent terhadap variabel independent secara dengan simultan. Untuk tingkat signifikansi yang dilakukan adalah 0,05 atau 5% = (α).

Melalui perhitungan hasil analisis spss dihitung bahwa uji F sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji *Goodness of Fit* (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	114.549	4	28.637	17.540	.000 ^b
Residual	40.817	25	1.633		
Total	155.367	29			

Bedasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan variabel untuk Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19.

4.4.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial model regresi *independent variable* memiliki pengaruh signifikan terhadap *dependent variable*. Suatu variabel independen dikatakan signifikan secara parsial (individu) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dapat diukur dengan melihat pada tabel *coefficients* apabila nilai Sig. kurang dari 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Ditambah dengan perhitungan t tabel sebagai berikut:

$$\begin{aligned}t_{tabel} &= t\left(\frac{\alpha}{2}; n - k - 1\right). \\ \alpha &= 5\% = t\left(\frac{0,05}{2}; 100 - 2 - 1\right). \\ &= t\left(\frac{\alpha}{2}; n - k - 1\right). \\ &= -0,025; 97. \\ &= 1,984.\end{aligned}$$

Maka dari perhitungan diatas t tabel yang dipakai adalah 1,984.

Tabel 4. 14 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.395	1.784		1.342	0.192
Sosialisasi Perpajakan	0.064	0.123	0.80	0.522	0.607
Pelayanan Fiskus	0.190	0.135	0.205	1.409	0.171
Self Assessment System	0.410	0.152	0.454	2.694	0.012
Pendapatan	0.233	0.111	0.275	2.094	0.047

Berdasarkan tabel diatas *coefficients* diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai signifikansi pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Y) adalah $0,607 > 0,05$ dan t hitung $0,522 <$ nilai t tabel 1,984 maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan H_1 ditolak.
2. Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus menghasilkan nilai signifikansi pengaruh pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Y) adalah $0,171 > 0,05$ dan t hitung $1,409 <$ nilai t tabel 1,984 maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan H_2 ditolak.
3. Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan *self assessment system* menghasilkan nilai signifikansi pengaruh pelaksanaan *self assessment system* (X_3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) adalah $0,012 > 0,05$ dan t hitung $2,694 >$ nilai t tabel 1,984 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan menghasilkan nilai signifikansi pengaruh pendapatan (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Y) adalah $0,047 > 0,05$ dan t hitung $2,094 >$ nilai t tabel 1,984 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi ujian (R^2) dimaksudkan agar mengetahui besarnya persentase variasi variabel bebas digunakan untuk menjelaskan variabel terikat dalam regresi model.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	.737	.695	1278

Dari tabel 4.15 diatas menghasilkan output pada *Adjusted R square* sebesar 0,695 yang membuktikan dan memperkuat hasil tabel *R square* bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1), pelayanan fiskus (X_2), pelaksanaan *self assessment system* (X_3), dan pendapatan (X_4) secara simultan sebesar 69,5% .

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data Penelitian

4.5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X_1)

Besarnya nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan regresi berganda sebesar $0,607 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,522 < \text{nilai t tabel } 1,984$ dengan demikian variabel sosialisasi perpajakan (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 (Y) sehingga hipotesis ditolak. Besarnya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 sebesar 0.080 atau 8%.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19. Dilihat dari indikator penelitian ini menggunakan tiga indikator yaitu sosialisasi secara langsung, sosialisasi secara tidak langsung, dan pemahaman sosialisasi. Menurut data yang sudah dianalisis sebanyak 100 responden memperoleh pengetahuan dan informasi pajak melalui banyak sumber secara tidak langsung seperti buku, situs internet, berdiskusi dalam forum tertentu. Sosialisasi Pajak diadakan pada intansi besar seperti kantor Pemkot atau balai kota serta tempat-tempat lainnya. Yang bersifat perwakilan dari Wajib Pajak sedangkan di daerah kelurahan terutama daerah pinggiran kota jarang diadakan sosialisasi pajak. Apalagi pada musim pandemi Covid-19 masyarakat dibatasi untuk akses berkumpul sehingga menyebabkan ketimpangan dalam sosialisasi. Serta ketika diadakan secara online masyarakat tidak memahami secara penuh aturan atau informasi yang ada di media online karena keterbatasan SDM yang ada.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012). Sosialisasi perpajakan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sosialisasi diberikan oleh petugas pajak yang diharapkan mampu memberikan dampak berupa taat dan patuhnya wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang aktif dalam kegiatan sosialisasi diharapkan mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan ini juga selaras dengan penelitian dari Wijayanto (2016) dan Tatiek yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh ini mengindikasikan bahwa apabila variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfasadun et al. (2016) yang menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan wajib pajak masih belum sadar akan kewajibannya.

4.5.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X_2)

Besarnya nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan regresi berganda sebesar $0,171 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,409 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,984$ dengan demikian variabel pelayanan fiskus (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 (Y) sehingga hipotesis ditolak. Besarnya pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 sebesar 0.205 atau 20,5%.

Tingkat pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini selaras dengan Andinata(2015). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena kualitas pelayanan dari aparat pajak belum dapat memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 ini kantor pelayanan melayani masyarakat

secara online. Dan Masyarakat belum paham mengenai peraturan atau *update* terbaru mengenai pajaknya.

4.5.3 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X_3)

Besarnya nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan regresi berganda sebesar $0,012 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,694 >$ nilai t tabel $1,984$ dengan demikian variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_3) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 (Y) sehingga hipotesis diterima. Besarnya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 sebesar 0.454 atau 45% .

Hasil penelitian ini membuktikan jika variabel pelaksanaan *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di Kota Semarang melaksanakan kegiatan perpajakan dengan baik serta memahami ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Eliyah, dkk. (2016) dan Setiawan (2017) mengenai pengaruh variabel pelaksanaan *self assessment system*. Karena semakin sering wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri maka akan menambah rasa patuh dari wajib pajak dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Apalagi dalam masa pandemi covid-19 ini masyarakat dituntut untuk semakin mandiri, dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyerukan kegiatan dimulai dari rumah dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) juga memberikan pelayanan melewati online. Keberhasilan ini harus dilakukan bersama-sama, dilihat dalam penelitian hasil pada variabel sosialisasi perpajakan terutama ketika diberikan kemudahan pada pelaksanaan *self assessment system* serta KPP Pratama menyadari pula akan pentingnya kegiatan sosialisasi mengenai *self assessment system* yang mana sudah jelas bahwa segala sesuatunya diserahkan kepada wajib pajak dalam melapor dan membayarnya.

4.5.4 Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X_4)

Besarnya nilai signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan regresi berganda sebesar $0,047 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,094 >$ nilai t tabel $1,984$ dengan demikian variabel pendapatan (X_4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 (Y) sehingga hipotesis diterima.

Besarnya pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 sebesar 0.275 atau 27,5%.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ganda Frisno et al (2016) dan Isthi Wahyuning (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pendapatan Wajib Pajak, peluang untuk patuh dalam membayar pajak akan semakin besar. Ditambah pada masa pandemi ini semua orang terkena dampaknya terutama pada sektor ekonomi yang membuat masyarakat sulit dalam menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhannya. Dari penelitian ini dapat dikatakan tingkat pendapatan yang diperoleh, akan mempengaruhi Wajib Pajak patuh atau tidak dalam kewajiban membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan tentang pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, dan pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sosialisasi Perpajakan (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t menggunakan spss pada tingkat signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan sebesar $0,607 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,522 < \text{nilai t tabel } 1,984$ dengan demikian variabel sosialisasi perpajakan (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 (Y) sehingga hipotesis ditolak.
- b. Pelayanan Fiskus (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menggunakan spss pada tingkat yang didapat sebesar $0,171 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,409 < \text{nilai t tabel } 1,984$ dengan demikian variabel pelayanan fiskus (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 (Y) sehingga hipotesis ditolak.
- c. Pelayanan *Self Assessment System* (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menggunakan spss pada tingkat yang didapat sebesar $0,012 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,694 > \text{nilai t tabel } 1,984$ dengan demikian variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_3) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 (Y) sehingga hipotesis diterima.
- d. Pendapatan (X_4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menggunakan spss pada tingkat yang didapat sebesar $0,047 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,094 > \text{nilai t tabel } 1,984$ dengan demikian variabel pendapatan (X_4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid-19 (Y) sehingga hipotesis diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya belumlah sempurna, dan peneliti menyadari akan hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, peneliti merasa adanya keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penyebaran angket atau kuisisioner, sehingga kemungkinan adanya data yang bias dikarenakan adanya pengisian yang kurang sungguh-sungguh. Dan juga saat penyebaran angket ini terdapat kesulitan dalam penyebarannya dikarenakan ruang lingkup yang besar di Kota Semarang.
- b. Penelitian ini memerlukan waktu yang lumayan panjang dikarenakan peneliti banyak melakukan kegiatan yang lain dan tidak bisa ditinggalkan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah disimpulkan dan dikemukakan keterbatasan penelitiannya, maka dari itu peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan penyebaran angket/ kuisisioner kepada responden melalui *google form*, peneliti sebaiknya lebih menjelaskan tujuan dan sasaran penelitian, agar responden dapat mengisi kuisisioner dengan memahami tujuan adanya penelitian dan mengisi kuisisioner sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
- b. Melakukan pemetaan tempat usaha terlebih dahulu yang tersebar di Kota Semarang, kemudian bekerjasama dengan orang-orang yang bisa membantu dalam pelaksanaan penyebaran angket kuisisioner untuk memudahkan penyebaran angket.
- c. Variabel dalam penelitian ini juga dapat diperluas oleh peneliti berikutnya, sehingga penelitian dapat lebih dikembangkan.
- d. Untuk pihak pembuat kebijakan dan institusi terkait disarankan agar lebih menyediakan akses serta turun ke pelosok daerah pinggiran untuk melakukan penjemputan ke setiap kelurahan agar menumbuhkan minat seseorang menjadi wajib pajak aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 4 (2), 5.
- Anggar Seni, d. (2017). *Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi*, 4043-4068.
- Aryanti, D. (2020). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 9 No 7*.
- Astuti, Desi, & Achadiyah, B. N. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Rumah Kos (Stud pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Nominal*. 5 (1), 6.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu - ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Danil, M. (2013). Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen. *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*. 4 (7), 9.
- Deni, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dharma, G. P. (2014). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1 (2014): 340-353, 340-353*.
- Edy, C. W. (2021, Juli 12). Dipetik Januari 27, 2022, dari www.jateng.antarnews.com:
www.jateng.antarnews.com
- Fadilah Lutfah, d. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2*, 452.
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan. Edisi 1*. Jakarta: Kencana.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iskandar. (2017). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1 No. 2*.
- Ismail, Fajri. (2018). *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Keuangan, K. (t.thn.). Dipetik April 7, 2022, dari www.kemenkeu.go.id:https://jdih.kemenkeu.go.id/in/page/dokumen
- Mahyarni. (2013). Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned (Sebuah Kajian tentang Perilaku). *Jurnal El-Riyasah* .
- Marjan. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Mukhlis, S. d. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Muslimah. (2020). Pengaruh Presepsi Kemudahan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak. *STIE Sutaatmadja Subang, Vol. 1 No. 01*, 81-89.
- Mardiatmoko, Gun. (2020). *Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]*)
The Importance of the Classical Assumption Test in Multiple Linear Regression Analysis (A Case Study Of’, *Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan, 14.3*, 333–42.
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Neolak, A. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Yogyakarta: Star Up.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohmawati, L., Prasetyono, & Rimawati, Y. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan* (hal. 4). Madura: Universitas Trunojoyo Press.

- Sari, M. M. (2019). Gender Memoderasi Pengaruh Love of Money Terhadap Tax Evasion Tendency. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 4 No. 1; 209.
- Semarang, D. K. (2022, Juni 6). <https://iumk.semarangkota.go.id>. Diambil kembali dari https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/: https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/
- Seni Anggar, d. (2017). Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi . *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4043-4068.
- Simanjuntak, e. a. (2012). Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare. *18 (3)*.
- Simanjuntak, e. a. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siyoto, Sandu, & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Sukimo, S. (2006). *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suryani, & Hendrayani. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tambunan. (2013). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tarsidi, D. (2007). Konseling untuk Penyesuaian Psikologis terhadap Kehilangan Penglihatan pada Individu Tunanetra Dewasa. *Jurnal PLB FIP*. 8 (1), 3.
- Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 1 (3)., 999 - 1008.
- Yusuf. (t.thn.). Dipetik Maret 22, 2022, dari www.penerbitdedpublish.com: <https://www.penerbitdedpublish.com/variabel-bebas-dan-terikat>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, Divisi dari Prenada Media.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perizinan Dirjen Pajak

11/26/22, 4:20 PM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Firdaus Purnama <purnamafirdaus200@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

21 November 2022 15.55

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: purnamafirdaus200@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
325/RISET/WPJ.10/2022 Semarang , 21 November 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Firdaus Aulia Purnama**

Dk. Bandung Indah Rt 07 Rw 08 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab.brebes

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **07989-2022** pada **28 Oktober 2022**, dengan informasi:

NIM : 1905046074
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assesment System, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Kanwil DjP Jawa Tengah I**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **21 November 2022 s/d 20 Mei 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



Firdaus Purnama <purnamafirdaus200@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: purnamafirdaus200@gmail.com

21 November 2022 15:55



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-325/RISET/WPJ.10/2022 Semarang , 21 November 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Firdaus Aulia Purnama**

Dk. Bandung Indah Rt 07 Rw 08 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. brebes

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **07989-2022** pada **28 Oktober 2022**, dengan informasi:

NIM : 1905046074
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assesment System, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Kanwil Djp Jawa Tengah I**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **21 November 2022 s/d 20 Mei 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 2 Surat Perizinan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No.175 Telp./Fax. (024) 3584086 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712 Semarang - 50135

Semarang, 04 Juni 2022

No. : B/1050/518/IV/2022
Lamp. :
Perihal : **Balasan Surat Permohonan Data**

Yth.
**KEPALA PRODI S1 AKUNTANSI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**
di -
SEMARANG

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang No. 1711/Un.10.5/D1/PG.00.00/05/2022 tanggal 27 Mei 2022. Perihal permohonan dan pengambilan data UMKM Kota Semarang, maka bersama ini kami berikan data jumlah Pelaku Usaha Mikro yang terdaftar di Kota Semarang, sebagaimana terlampir kepada :

No	Nama	NIM	Data yang diperlukan
1	Firdaus Aulia Purnama	1905046074	UMKM Kota Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
Kepala Bidang Pelayanan Usaha Mikro,



INDRIANI DYAH KUSUMO W., SH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Pertinggal.

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian Format G-Form

The image shows a screenshot of a Google Forms survey. The browser tabs include WhatsApp, Kuisisioner Penelitian Pengaruh So..., 1905046074_MOH FARIS MUR V..., APozabzyghwbyx8WPAAnyGdP?, and too motor - Penelusuran Google. The address bar shows the form URL: docs.google.com/forms/d/1VQcplATgvdYVPIedDuSqD_otoKjwKHCkvaP3yRj0M/edit. The form title is 'Kuisisioner Penelitian Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assessment System, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19'. The form content includes a greeting, a request for participation, and a note about a prize.

Pertanyaan Jawaban 101 Setelan

Kuisisioner Penelitian Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assessment System, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid- 19

Assalamualaikum wr.wb

Perkenalkan saya Firdaus Aulia Purnama (1905046074) Prodi Akuntansi Syariah FEBI UIN Walisongo Semarang. Saat ini saya sedang mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi. Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul data primer. Untuk itu, saya ingin meminta kesediaan saudara/i untuk meluangkan waktu dalam kuisisioner ini. Seluruh jawaban yang telah saudara/i berikan, akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk penelitian dan semua jawaban dari responden terjamin kerahasiaannya. Atas partisipasi dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Semoga segala urusan dan keperluan saudara/i dimudahkan oleh Allah SWT,
Amin

Note: Bagi yang beruntung akan mendapatkan pulsa sebesar 50k (2 Responden umkm terbaik).

Kuesioner Penelitian

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya:

Nama : Firdaus Aulia Purnama

NIM : 1905046074

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul:

“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada Masa Pandemi Covid - 19”.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i saya sampaikan terimakasih.

Hormat saya,

Firdaus Aulia Purnama

NIM. 1905046074

KUESIONER PENELITIAN

A. Data Responden

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Tingkat Pendidikan :
5. Usia :
6. Pekerjaan :
7. Pendapatan/tahun :

B. Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda silang (V) di antara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. STS = Sangat Tidak Setuju dimasukkan dalam kelompok 1
2. TS = Tidak Setuju dimasukkan dalam kelompok 2
3. KS = Kurang Setuju dimasukkan dalam kelompok 3
4. S = Setuju dimasukkan dalam kelompok 4
5. SS = Sangat Setuju dimasukkan dalam kelompok 5

KUISIONER PENELITIAN

Nama	Singkatan	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Kurang Setuju	KS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya sadar akan kewajiban membayar pajak.					
2	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
3	Saya melaporkan dan mengisi SPT dengan jelas dan akurat.					
4	Saya belum pernah dijatuhi sanksi apapun.					

2. Sosialisasi Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.					
2	Saya memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.					
3	Saya sudah memahami kewajiban wajib pajak.					
4	Pegawai KPP telah melaksanakan sosialisasi tentang perpajakan di wilayah anda.					

3. Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Fiskus sudah menguasai seputar masalah perpajakan.					
2	Fiskus melayani dan membantu saya dalam pelaporan pajak.					
3	Fiskus memberikan pelayanan secara profesional.					
4	Fiskus memahami peraturan perundangan perpajakan.					

4. *Self Assessment System*

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya sudah memahami untuk menentukan pajaknya sendiri.					
2	Saya sudah terbuka dalam pelaporan pajak.					
3	Saya mematuhi kewajiban membayar pajak.					
4	Saya mengetahui sanksi yang diberikan apabila tidak membayar pajak.					

5. Pendapatan

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Rata – rata penerimaan pendapatan saya sudah mencukupi.					
2	Saya mampu membayar pajak.					
3	Saya dengan jujur membayarkan pajak sesuai pendapatan.					
4	Saya menyanggupi Kementerian Keuangan dalam melaporkan pajak pendapatan.					

Lampiran 4 Jawaban Responden

Jawaban Responden

No Resp onde n	Presepsi X_1				To tal	Presepsi X_2				To tal	Presepsi X_3				To tal	Presepsi X_4				To tal	Presepsi Y				To tal
	X_1 1	X_1 2	X_1 3	X_1 4		X_2 1	X_2 2	X_2 3	X_2 4		X_3 1	X_3 2	X_3 3	X_3 4		X_4 1	X_4 2	X_4 3	X_4 4		Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	
1	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	3	4	4	13	5	4	4	4	17
2	2	4	2	1	9	4	2	3	4	13	1	2	2	3	8	3	1	2	2	8	2	2	1	5	10
3	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18
4	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	4	4	4	5	17	4	4	5	4	17
5	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	3	4	5	4	16	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20
6	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	3	5	5	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
7	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	4	3	13	4	4	4	4	16	4	4	4	1	13
8	4	3	5	3	15	5	4	2	4	15	4	4	3	5	16	5	4	3	4	16	3	5	3	4	15
9	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
10	3	3	3	4	13	4	4	3	4	15	3	3	3	4	13	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
11	3	4	4	3	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
12	4	4	5	4	17	4	5	5	4	18	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
13	5	4	4	4	17	4	3	4	4	15	4	3	4	4	15	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
16	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
17	4	4	4	3	15	4	5	4	4	17	4	4	5	4	17	2	3	4	4	13	4	4	4	4	16
18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	5	5	19
19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	3	4	4	4	15	5	5	5	5	20
20	3	3	2	2	10	3	3	3	2	11	3	3	3	2	11	2	2	2	2	8	2	4	4	3	13
21	4	5	4	3	16	5	4	5	5	19	3	4	3	3	13	1	3	3	3	10	4	3	3	5	15
22	4	4	4	3	15	3	3	3	3	12	2	2	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
23	5	5	5	4	19	4	4	5	5	18	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18
24	3	3	5	3	14	2	3	3	2	10	3	4	3	4	14	5	5	1	5	16	2	3	5	5	15
25	3	3	3	2	11	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

26	4	5	5	5	19	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
27	4	5	4	4	17	5	4	4	4	17	4	5	4	3	16	4	4	5	4	17	4	4	5	5	18
28	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20
29	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17	3	4	4	4	15	4	5	5	5	19	5	4	4	5	18
30	4	5	4	3	16	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
31	5	5	4	3	17	4	5	4	5	18	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	5	4	4	3	16
32	5	5	5	3	18	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20
33	4	4	4	3	15	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
35	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
36	5	5	5	4	19	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20
37	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
38	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
39	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	4	5	4	5	18	4	4	4	4	16	4	5	5	4	18
40	3	4	2	3	12	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8	4	2	2	2	10	2	3	3	4	12
41	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
42	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
43	3	4	4	4	15	3	4	4	3	14	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	4	3	4	4	15
44	3	5	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14	4	3	3	4	14
45	4	4	3	3	14	4	4	3	4	15	3	4	4	3	14	2	4	4	4	14	4	4	4	5	17
46	5	5	3	3	16	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	3	4	4	15	5	3	4	5	17
47	5	5	5	3	18	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18
48	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
49	5	5	5	3	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
50	5	5	5	3	18	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
51	4	4	4	2	14	4	4	4	4	16	3	4	4	3	14	3	3	4	4	14	4	3	3	4	14
52	2	4	4	2	12	3	2	3	3	11	2	3	4	4	13	1	2	3	2	8	4	4	3	5	16
53	4	4	3	2	13	4	4	4	4	16	3	4	3	3	13	3	4	3	3	13	4	3	3	4	14
54	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	3	4	4	3	14	4	4	4	4	16	4	3	4	5	16
55	5	5	5	4	19	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	5	4	4	5	18
56	4	3	3	3	13	4	4	4	4	16	3	4	4	3	14	3	3	4	3	13	4	3	3	4	14
57	4	3	3	3	13	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13	4	3	3	4	14

58	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	4	4	3	4	15	4	2	3	4	13
59	4	4	4	3	15	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
60	2	4	3	2	11	3	2	3	3	11	3	4	4	3	14	3	4	4	3	14	4	4	3	5	16
61	4	3	3	3	13	4	4	4	3	15	3	3	4	3	13	4	4	4	4	16	4	3	3	5	15
62	4	4	4	1	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	4	4	3	4	15
63	4	3	2	1	10	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	3	4	4	4	15	4	3	3	5	15
64	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	4	3	4	5	16
65	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
66	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	4	5	3	15	4	4	4	4	16	5	3	4	5	17
67	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	3	4	4	13	4	4	3	3	14	4	4	3	5	16
68	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
69	4	3	3	3	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
70	4	4	4	3	15	5	5	5	5	20	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
71	4	4	4	1	13	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
72	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	2	4	4	4	14	3	4	4	4	15	4	2	4	4	14
73	4	4	4	1	13	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
74	2	4	3	1	10	4	3	3	3	13	2	4	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
75	4	4	4	1	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	4	5	5	17	5	5	5	5	20
76	4	4	4	1	13	4	4	5	5	18	4	4	1	3	12	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
77	3	3	3	2	11	4	5	4	4	17	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
78	4	3	3	2	12	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18
80	4	4	4	3	15	4	3	4	3	14	3	4	4	5	16	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14
81	3	4	4	1	12	4	4	4	4	16	4	5	5	3	17	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17
82	4	4	4	2	14	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	2	4	16
83	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	3	3	4	3	13	4	4	4	4	16	4	2	3	5	14
84	4	5	4	3	16	4	5	5	4	18	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
85	4	4	4	2	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
87	4	4	3	2	13	4	3	3	3	13	1	3	4	4	12	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
88	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
89	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

90	4	3	3	3	13	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	3	5	5	17	5	5	5	5	20
91	4	4	4	3	15	4	4	4	3	15	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8	4	5	1	5	15
93	5	5	5	3	18	4	4	4	3	15	4	4	5	4	17	4	5	3	5	17	4	4	4	4	16
94	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	4	4	16
96	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	4	5	4	17
97	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
98	4	3	3	3	13	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
99	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
100	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

Lampiran 5 Hasil Perhitungan SPSS

1. Hasil Uji Stasistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Total_X1	100	11	9	20	15.32	2.514	6.321
Total_X2	100	10	10	20	16.12	2.100	4.410
Total_X3	100	12	8	20	15.36	2.218	4.920
Total_X4	100	12	8	20	15.44	2.253	5.077
Total_Y	100	10	10	20	16.29	1.986	3.945
Valid N (listwise)	100						

2. Hasil Uji Validitas

Variabel/Indikator	Item	R		Keterangan
		hitung	R tabel	
Sosialisasi perpajakan	1	0,453	0,196	valid
	2	0,378	0,196	valid
	3	0,534	0,196	valid
	4	0,311	0,196	valid
Pelayanan fiskus	1	0,377	0,196	valid
	2	0,400	0,196	valid
	3	0,468	0,196	valid
	4	0,364	0,196	valid
Pelaksanaan <i>self assessment system</i>	1	0,464	0,196	valid
	2	0,547	0,196	valid
	3	0,651	0,196	valid
	4	0,493	0,196	valid
Pendapatan	1	0,689	0,196	valid
	2	0,237	0,196	valid
	3	0,527	0,196	valid
	4	0,664	0,196	valid
Kepatuhan wajib pajak umkm	1	0,614	0,196	valid
	2	0,773	0,196	valid
	3	0,754	0,196	valid
	4	0,762	0,196	valid

3. Hasil Uji Reabilitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	153.05	291.866	.691	.922
x1.2	152.94	295.936	.573	.923
x1.3	153.11	289.432	.736	.921
x1.4	153.82	289.523	.516	.923
Total_X1	141.74	243.608	.752	.923
X2.1	153.01	299.121	.533	.924
X2.2	153.06	295.188	.612	.923
X2.3	153.01	295.162	.624	.923
X2.4	153.04	296.362	.558	.923
Total_X2	140.94	261.875	.628	.924
X3.1	153.49	289.606	.692	.921
X3.2	153.17	292.223	.735	.922
X3.3	153.07	294.167	.620	.923
X3.4	153.15	293.907	.671	.922
Total_X3	141.70	246.010	.834	.918
X4.1	153.29	298.087	.415	.925
X4.2	153.20	293.313	.666	.922
X4.3	153.18	292.472	.668	.922
X4.4	153.13	292.882	.698	.922
Total_X4	141.62	253.046	.709	.922
Y1	152.90	292.596	.721	.922
Y2	153.15	294.634	.554	.923
Y3	153.13	290.437	.650	.922
Y4	152.77	303.270	.244	.926
Total_Y	140.77	255.997	.771	.919

4. Hasil Uji menggunakan One Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.18637950
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.066
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

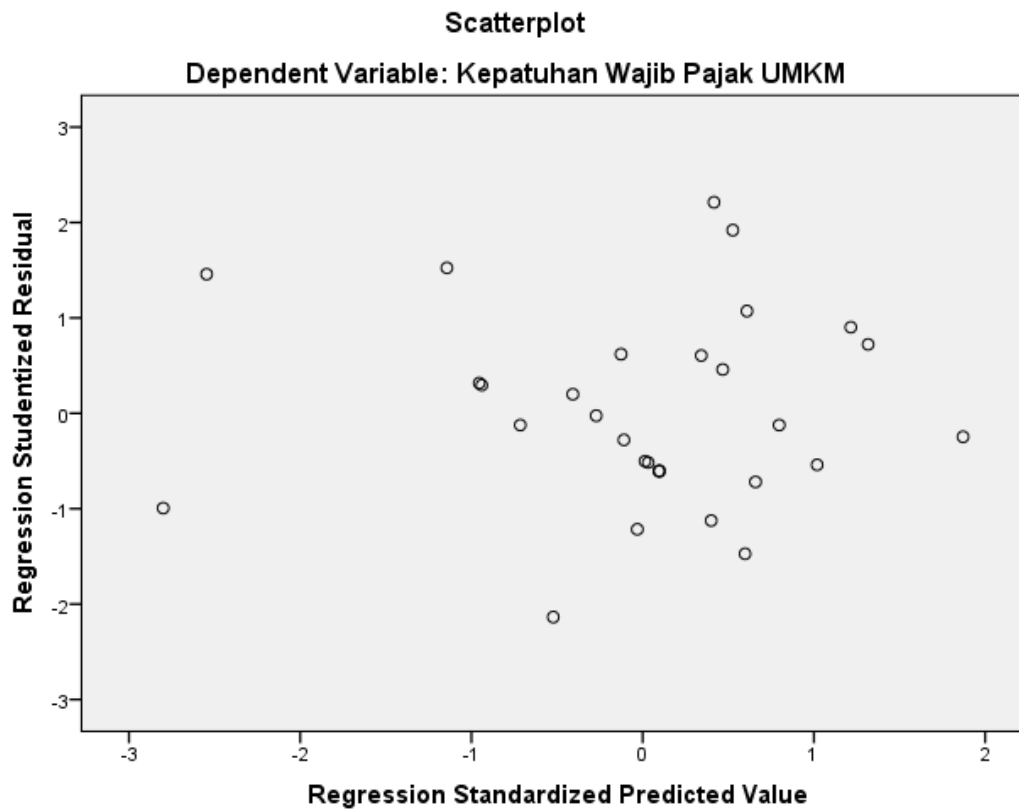
d. This is a lower bound of the true significance.

5. Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.395	1.784		1.342	.192		
	Sosialisasi Perpajakan	.064	.123	.080	.522	.607	.442	2.260
	Pelayanan Fiskus	.190	.135	.205	1.409	.171	.498	2.008
	Self Assesment System	.410	.152	.454	2.694	.012	.371	2.697
	Pendapatan	.233	.111	.275	2.094	.047	.610	1.639

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

6. Hasil Scatter plot



7. Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.881	.784		2.399	.018
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	-.018	.048	-.053	-.371	.711
	PELAYANAN FISKUS	.009	.049	.021	.175	.862
	PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM	-.071	.061	-.183	-1.162	.248
	PENDAPATAN	.023	.051	.062	.461	.646

a. Dependent Variable: Abs_RES

8. Hasil Uji Goodness of Fit (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	114.549	4	28.637	17.540	.000 ^b
	Residual	40.817	25	1.633		
	Total	155.367	29			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Pendapatan, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Self Assesment System

9. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	2.395		
	Sosialisasi Perpajakan	.064	.123	.080	.522	.607
	Pelayanan Fiskus	.190	.135	.205	1.409	.171
	Self Assesment System	.410	.152	.454	2.694	.012
	Pendapatan	.233	.111	.275	2.094	.047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	2.395		
	Sosialisasi Perpajakan	.064	.123	.080	.522	.607
	Pelayanan Fiskus	.190	.135	.205	1.409	.171
	Self Assesment System	.410	.152	.454	2.694	.012
	Pendapatan	.233	.111	.275	2.094	.047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Firdaus Aulia Purnama
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 01 November 2001
Alamat Rumah : Bumiayu, Kabupaten Brebes
No. HP : 0881-2432-534
E-mail : purnamafirdaus200@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. SDN 04 Bumiayu
2. SMP Islam Ta'alumul Huda Bumiayu
3. SMA Bustanul Ulum NU Bumiayu
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, 25 November 2022



Firdaus Aulia Purnama
NIM. 1905046074